

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Peranan Humas (Hubungan Masyarakat) atau *Public Relations* sangat dibutuhkan oleh hampir semua bentuk organisasi atau lembaga, bersifat komersial maupun tidak komersial, dari perusahaan/industri, organisasi profesi, institusi pendidikan, organisasi sosial budaya sampai pemerintahan. Secara garis besar peran Humas adalah komunikator sebuah organisasi/lembaga/perusahaan, baik kepada dan dari publik internal maupun publik eksternal. Karena itu, Humas merupakan salah satu ujung tombak dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk bersaing dalam era globalisasi. Bagi sebuah organisasi, Humas sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi dengan para *stakeholders* ataupun untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program organisasi kepada publik.¹

Keberadaan unit Humas di sebuah instansi milik pemerintah merupakan suatu keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar.²

Pejabat Humas harus dapat menguasai dinamika masyarakat sekaligus memahami simbol dan kesan yang dapat ditimbulkannya. Kerap terjadi martabat suatu instansi, sangat tergantung pada ikon-ikon tertentu. Dalam kinerja Humas pemerintah, ikon tersebut biasanya adalah pemimpin seperti Menteri, Sekretaris Jenderal dan para Dirjen. Tugas humas adalah menjaga ikon tersebut agar citranya tetap terjaga, bersih, berwibawa, karena citra ikon mencapai 65% dari citra dan martabat institusi. Fungsi manajerial adalah nadi seorang pejabat Humas. Humas menata sistem sekaligus menata lini tempurnya secara terstruktur dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi, seperti menghadapi media, komunitas dan masyarakat luas.

Dalam hubungannya dengan pemerintah, Humas mengurus representasi pemerintah dengan parlemen, sebagai *conflict-mediation*, atau mengurus hubungan antara instansi dengan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Humas tidak bertugas untuk menjadi pajangan, tapi juga dituntut untuk mengerti tingkah-laku dan memperhatikan media, pegawai dan kelompok lain yang juga merupakan bagian dari

¹ Badan Operasi Bersama (2007). PT. BSP-Pertamina Hulu, CPP Block, Central Sumatra Basin(BOBCPP), *Beranda, Ujung Tombak*. Diambil 20 Oktober 2008, dari <http://www.bobcpp.co.id/bobd>

² Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi:Konsepsi dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005) hal.339

deskripsi kerjanya. Untuk meningkatkan komunikasi, Humas juga membangun dan memelihara hubungan yang kooperatif dengan wakil-wakil komunitas, masyarakat, pegawai dan *public interest group*, juga dengan perwakilan dari media cetak dan *broadcast*. Humas menyampaikan informasi pada publik, mengenai kebijakan, aktivitas dan prestasi dari suatu instansi. Tugas tersebut juga berhubungan dengan mengupayakan pihak manajemen supaya tetap sadar terhadap tingkah laku publik dan menaruh perhatian terhadap grup-grup dan organisasi, dengan siapa mereka biasa berhubungan. Humas menyiapkan pers rilis dan menghubungi orang-orang di media, yang sekiranya dapat menerbitkan atau menyiarkan materi dan informasi terkait dengan instansi dimana humas tersebut bernaung. Banyak laporan khusus di radio atau televisi, berita di koran dan artikel di majalah, bermula dari meja Humas. Humas mengatur dan mengumpulkan program-program untuk memelihara dan mempertahankan kontak antara perwakilan organisasi dan publik. Humas mengatur *speaking engagement*, pidato untuk kepentingan sebuah instansi, membuat film, slide, atau presentasi visual lain dalam rapat dan merencanakan konvensi. Sebagai tambahan, humas juga bertanggung jawab menyiapkan *annual reports* dan menulis proposal untuk proyek-proyek yang beragam. Dalam pemerintahan, Humas sering disebut sebagai "sekretaris pers", "*information officer*", "*public affair specialist*" atau "*communications specialist*", bertugas menginformasikan pada publik mengenai aktivitas yang dilakukan pemerintah dan pejabat-pejabat eselon I. Humas juga berurusan dengan publisitas institusi, serta berurusan dengan semua aspek pekerjaan. Humas akan menghubungi orang-orang, merencanakan dan melakukan penelitian dan menyiapkan material untuk distribusi. Humas juga mengurus pekerjaan *advertising* atau promosi untuk mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah.³

Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) merupakan instansi yang dilahirkan kembali dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Hal ini merupakan sinyal yang kuat adanya keseriusan Pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan peran pemuda dan olahraga sebagai dua pilar bangsa dalam menunjang pembangunan nasional. Sebagai sebuah kementerian baru yang dimunculkan kembali paska likuidasi pada pemerintahan sebelumnya, kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dihadapkan pada banyak kendala, baik teknis maupun nonteknis. Hal utama yang menjadi perhatian adalah penataan kelembagaan yang menopang kerja kementerian. Pembentukan dan pengesahan

³ Fatma Puspita Sari, Staf Biro Humas, "*Revitalisasi Humas Pemerintahan*", Majalah Hukum & HAM Online <http://majalah.depkuham.go.id/node/70> HLN Vol. V No. 22 Rubrik: Wacana, 1 Feb 2007, 20/10/08

struktur kelembagaan memerlukan waktu yang tidak singkat dan melalui berbagai pembahasan yang bertahap dan terpadu guna menghasilkan struktur yang efektif dan efisien.⁴

Dalam berhubungan dan menjalin komunikasi yang baik dengan publik internal dan eksternalnya, KEMENPORA memiliki biro khusus yang menangani hal ini yaitu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berada dibawah Sekretaris Menteri. Biro ini dipimpin oleh seorang pejabat eselon dua yang membawahi empat kepala bagian yaitu: Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Penerbitan. Pejabat Humas membawahi tiga Kepala Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

I.2. Permasalahan

Walaupun sudah mempunyai jabatan jelas dalam struktur organisasi ternyata penerapan fungsi, peran, tugas dan strategi Humas tidak berjalan optimal. Adanya keterbatasan wewenang yang diberikan dan keterbatasan kompetensi baik secara fisik (jumlah personil) dan latar belakang pendidikan menjadi penghambat. Selain itu secara latar belakang, pendidikan Humas di KEMENPORA belum semuanya memadai untuk kapasitas sebagai Humas, yang paling mendasar adalah belum adanya deskripsi pekerjaan yang jelas dan peraturan menteri yang resmi yang menjadi acuan kerja. Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi, peran, tugas dan strategi Humas dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas?
2. Bagaimana pemahaman mengenai fungsi, peran, tugas dan strategi Humas di Biro Hukum dan Humas?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsi, peran dan tugas dan strategi Humas?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fungsi, peran, tugas dan strategi Humas yang dilaksanakan oleh Biro hokum dan Humas.

⁴ Bagian Hukum & Hubungan Masyarakat, Biro Umum Sekretariat Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Satu Tahun Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga* (Jakarta, 2005), hal. 8.

2. Mengkaji pemahaman mengenai fungsi, peran, tugas dan strategi Humas di Biro Hukum dan Humas.
3. Menganalisa apa saja hambatan dan kelemahan melaksanakan fungsi, peran, tugas dan strategi Humas.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1 Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran fungsi, tugas, peran dan strategi Humas di lembaga pemerintah Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan fungsi, tugas, peran dan strategi Humas pada lembaga sejenis pada umumnya.

I.4.2 Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan yang maksimal pada Humas Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

